

**STATISTIK  
KESEJAHTERAAN  
RAKYAT**

**2016**

**KABUPATEN BLORA**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BLORA**

**STATISTIK  
KESEJAHTERAAN  
RAKYAT**

**2016**

**KABUPATEN BLORA**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BLORA**

## KATA PENGANTAR

---

Buku “Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blora Tahun 2016” merupakan salah satu publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora pada tahun ini.

Buku ini merupakan publikasi yang sebagian besar datanya diambil dari hasil pengumpulan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan pada Maret 2016 di Kabupaten Blora. Keterangan yang dikumpulkan meliputi berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat, seperti demografi, pendidikan, kesehatan, fertilitas, keluarga berencana, hingga keterangan perumahan.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan potret nyata kondisi kesejahteraan di Kabupaten Blora pada tahun 2016.

Kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini, kami sampaikan terima kasih. Harapan kami, kerja sama yang sudah kita bangun sejauh ini dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang. Begitu pula dengan keluarannya, semoga semakin banyak pihak yang memanfaatkannya baik untuk kepentingan akademis maupun praktis.

Tak ada gading yang tak retak. Demikian pula dengan publikasi ini, atas ketidaksempurnaannya kami mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca. Dengan demikian, publikasi kami berikutnya bisa lebih memenuhi harapan para pengguna data.

Blora, 26 September 2017  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Blora

Drs. Heru Prasetyo  
NIP. 19641021 198402 1 001

---

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Sumber Data.....	3
1.4 Sistematika Penyajian.....	3
BAB II KONSEP DAN DEFINISI.....	5
2.1 Kependudukan .....	5
2.2 Kesehatan .....	6
2.3 Pendidikan.....	7
2.4 Perumahan.....	9
2.5 Pengeluaran.....	10
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB) .....	11
1.1 Kondisi Wilayah .....	11
1.2 Jumlah Penduduk .....	12
1.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk .....	13
1.4 Rasio Jenis Kelamin.....	15
1.5 Struktur Umur .....	15
1.6 Rasio Ketergantungan.....	16

---

1.7 Kepemilikan Akta Kelahiran .....	17
1.8 Fertilitas dan Umur Perkawinan Pertama .....	18
1.9 Keluarga Berencana .....	20
<b>BAB IV KESEHATAN .....</b>	<b>23</b>
2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat .....	23
2.2. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan .....	25
2.3. Penggunaan Jaminan Kesehatan .....	26
2.4. Kebiasaan Merokok .....	27
2.5. Penolong Proses Kelahiran .....	28
<b>BAB V PENDIDIKAN.....</b>	<b>31</b>
5.1 Tingkat Pendidikan .....	32
5.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) .....	33
5.3 Angka Partisipasi Murni (APM).....	34
5.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) .....	36
<b>BAB VI PERUMAHAN.....</b>	<b>39</b>
6.1 Kualitas Rumah Tempat Tinggal .....	39
6.2 Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal .....	41
6.3 Fasilitas Perumahan .....	42
6.4 Bahan Bakar Memasak .....	43
6.5 Penguasaan Alat Komunikasi .....	44
<b>BAB VII PENGELUARAN .....</b>	<b>45</b>
7.1. Pengeluaran Rumah Tangga .....	45
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
8.1 Kesimpulan .....	49
8.2 Saran .....	49
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>

---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Blora, 2014 – 2016 .....	15
Tabel 2. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Blora Tahun 2016 .....	33
Tabel 3. Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Blora, 2016 .....	35
Tabel 4. Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Blora, 2016 .....	36
Tabel 5. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Blora, 2014-2016.....	42
Tabel 6. Jumlah Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan dan Persentasenya Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Blora, 2016.....	47

---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kabupaten Blora, 2014 - 2016 .....	12
Gambar 2. Persentase jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Blora, 2016 .....	14
Gambar 3. Persentase Penduduk Kabupaten Blora Menurut Kelompok Umur 2014-2016.....	16
Gambar 4. Persentase Wanita Usia Subur (15-49 Tahun) yang Berstatus Pernah Kawin menurut Partisipasi ber-KB di Kabupaten Blora, 2014-2016.....	20
Gambar 5. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Kabupaten Blora, 2014-2016 .....	24
Gambar 6. Persentase Penduduk Menurut Alasan Tidak Berobat di Kabupaten Blora, 2016 .....	26
Gambar 7. Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Blora, 2016 .....	27
Gambar 8. Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas di Kabupaten Blora Menurut Kebiasaan Merokok, 2016 .....	28
Gambar 9. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Blora, 2016 .....	33
Gambar 10. Persentase Rata-rata Luas Lantai Kabupaten Blora, 2015-2016 .....	40
Gambar 11. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Blora, 2016 (rupiah) .....	46

---

## DAFTAR LAMPIRAN

Tabel A. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Blora, 2014 – 2106.....	51
Tabel B. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Blora, 2014 – 2016.....	51
Tabel C. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Kabupaten Blora, 2014 – 2016.....	52
Tabel D. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Kabupaten Blora, 2014 – 2016.....	52
Tabel E. Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Kabupaten Blora, 2014 – 2016.....	52
Tabel F. Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama Kabupaten Blora, 2014 – 2016 .....	53
Tabel G. Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Kabupaten Blora, 2014 – 2016 .....	53

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama pembangunan Negara Indonesia. Pemerintah berupaya mencapainya dengan melakukan berbagai program pembangunan demi memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Beberapa statistik yang menggambarkan karakteristik masyarakat harus dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya. Karakteristik tersebut direkam dengan baik melalui survei-survei yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.

Pelaksanaan pembangunan hendaknya selalu dievaluasi, baik secara internal maupun eksternal. BPS secara independen melakukan pendataan langsung ke masyarakat untuk memotret kondisi terkini masyarakat dari sisi sosial ekonominya. Potret tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan potret itu pula evaluasi dapat dilakukan demi perencanaan program pembangunan berikutnya yang lebih tepat sasaran.

Salah satu sumber informasi yang dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun. Namun, untuk Sakernas pada tahun 2016 yang lalu tidak dapat diselenggarakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran. Imbasnya, angka estimasi mengenai kondisi ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota tidak bisa didapatkan. Akibatnya, data ketenagakerjaan pada publikasi ini tidak dapat disertakan.

---

Terkait dengan survei dengan unit penelitian berupa rumah tangga, dapat dikatakan bahwa kedua survei tersebut menjadi primadona. Dengan kata lain, data keluarannya sangat ditunggu oleh berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, bahkan perorangan. Seperti sudah mafhum diketahui, kedua survei tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia khususnya yang berhubungan dengan karakteristik sosial ekonomi.

Bila kita mengkaji kesejahteraan rakyat, maka aspek yang dikaji sangatlah luas. Di samping aspek ekonomi, aspek lain yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rakyat juga perlu mendapat perhatian. Aspek lain yang dicakup adalah angka kematian bayi, angka partisipasi sekolah, angka melek huruf di bidang pendidikan, tingkat pengangguran, pemberian ASI dan imunisasi untuk balita, partisipasi KB, serta kondisi perumahan tempat tinggal.

## **1.2 Tujuan**

Secara umum, tujuan penyajian publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Blora tahun 2016. Kondisi tersebut dapat dianggap untuk menggambarkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Blora.

Secara khusus, publikasi ini juga ditujukan untuk melengkapi data di bidang sosial kependudukan yang lebih akurat dalam rangka:

- ✓ Memperoleh gambaran tentang pencapaian status sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Blora melalui berbagai indikator kependudukan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pengeluaran rumah tangga.
- ✓ Menyediakan data sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi kebijakan pemerintah.

- 
- ✓ Menambah informasi tentang data sosial dan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang bermanfaat bagi berbagai pihak.

### **1.3 Sumber Data**

Secara umum, data yang ditampilkan pada publikasi ini diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan pada bulan Maret 2016. Selain itu, berbagai publikasi yang menyajikan data-data pendukung terkait dengan Kabupaten Blora juga digunakan, seperti Blora dalam Angka 2017 dan publikasi-publikasi lain yang relevan.

### **1.4 Sistematika Penyajian**

Publikasi ini dibagi dalam delapan bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, sumber data, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi konsep dan definisi yang akan banyak digunakan dalam publikasi. Bab ketiga membahas masalah kependudukan dan keluarga berencana, seperti jumlah penduduk, rasio ketergantungan, fertilitas, umur perkawinan pertama, hingga keluarga berencana.

Bab keempat membahas tentang kesehatan yang diukur dengan berbagai indikator derajat kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, kebiasaan merokok, serta penolong proses kelahiran. Bab kelima membahas pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, dan angka partisipasi kasar.

Bab keenam membahas kondisi perumahan masyarakat Kabupaten Blora mencakup kualitas rumah yang ditinggali, kepemilikan rumah, fasilitas perumahan, bahan bakar yang digunakan, penerangan, serta penguasaan alat komunikasi.

---

Bab ketujuh membahas tentang pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga. Pengeluaran yang dicakup di sini adalah pengeluaran makanan dan non-makanan. Bab delapan merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran, serta harapan atas diterbitkannya publikasi ini.

<http://blorakab.bps.go.id>

---

## **BAB II**

### **KONSEP DAN DEFINISI**

Konsep dan definisi pada bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca agar dapat menginterpretasikan data-data yang disajikan pada buku ini apa adanya. Interpretasi yang benar sangat penting untuk memahami realitas sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Blora.

#### **2.1 Kependudukan**

##### **1. Kepadatan Penduduk**

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi. Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut.

##### **2. Rasio Jenis Kelamin**

Perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

##### **3. Rasio Ketergantungan**

Perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

##### **4. Akte kelahiran**

Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil.

---

## 5. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama

Rata-rata umur seorang wanita pada saat melaksanakan perkawinan yang pertama kali.

## 6. Kontrasepsi Tetap (Kontap)

Alat/cara KB yang bersifat permanen/tetap, meliputi: MOW, MOP, AKDR/IUD dan Susuk/Implant

## 7. Penolong persalinan

Siapa yang menolong pada saat proses kelahiran anak (balita). Hingga tahun 2014, penolong persalinan ditanyakan untuk anak usia di bawah lima tahun. Namun mulai tahun 2015, penolong persalinan ditanyakan untuk wanita usia 15-49 tahun berstatus pernah kawin yang melahirkan anak dalam 2 tahun terakhir.

## 8. Partisipasi Keluarga Berencana

Proporsi peserta Keluarga Berencana (KB) aktif terhadap jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

## 2.2 Kesehatan

### 1. Keluhan kesehatan

Keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.

### 2. Menderita sakit

Mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan

---

secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya).

### 3. Berobat jalan

Upaya anggota ruta yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah anggota ruta.

### 4. Jaminan kesehatan

Program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

### 5. Merokok

Aktifitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa pada sebulan terakhir sampai saat pencacahan. Terdapat 2 (dua) cara merokok yang umum dilakukan, yaitu pertama menghisap lalu menelan asap rokok ke dalam paru-paru dan dihembuskan; kedua hanya menghisap sampai mulut lalu dihembuskan melalui mulut atau hidung

## 2.3 Pendidikan

### 1. Tidak/belum pernah bersekolah

Anggota ruta berumur 5 tahun ke atas yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar

---

## 2. Masih bersekolah

Anggota ruta berumur 5 tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C). Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.

## 3. Tidak bersekolah lagi

Anggota ruta berumur 5 tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.

## 4. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah.

## 5. APS (Angka Partisipasi Sekolah)

Proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Sekolah memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

## 6. APM (Angka Partisipasi Murni)

Proporsi jumlah anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka Partisipasi Murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan

## 7. APK (Angka Partisipasi Kasar)

Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

---

## 8. Rata-rata Lama Sekolah

Jumlah Tahun belajar penduduk umur 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angkanya maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya

### 2.4 Perumahan

#### 1. Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari sebatas atap.

#### 2. Dinding Rumah

Sisi luar/batas dari suatu bangunan/penyekat dengan bangunan fisik lain.

#### 3. Atap Rumah

Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya.

#### 4. Atap Layak

Jenis atap yang digunakan antara lain beton, genteng, sirap, seng dan asbes

#### 5. Fasilitas Air Minum

Instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau Non PAM/PDAM termasuk sumur gali dan sumur pompa.

#### 6. Fasilitas Buang Air Besar

Kemudahan suatu rumah tangga dalam menggunakan jamban.

---

## 7. Tangki

Tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun tidak, termasuk di sini daerah pemukiman yang mempunyai Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.

## 8. SPAL (Sistem Pembuangan Air Limbah) terpadu

Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah rumah tangga tidak ditampung dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair.

## 2.5 Pengeluaran

### 1. Konsumsi

Meliputi konsumsi makanan dan bukan makanan.

### 2. Pengeluaran Rata-Rata per Kapita

Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

---

## **BAB III**

### **KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

Kependudukan berkaitan erat dengan dinamika pembangunan. Di satu sisi, jumlah penduduk yang besar berpotensi bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan bila dibarengi dengan kualitas yang mumpuni. Namun, di sisi yang lain, penduduk dapat menjadi penghambat pembangunan bila kualitasnya yang rendah. Selain masalah kualitas sumber daya manusia, kepadatan penduduk, tingkat ketergantungan, dan pertumbuhan penduduk merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

#### **1.1 Kondisi Wilayah**

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya yang berada di bagian timur provinsi membuat Kabupaten Blora selain berbatasan dengan kabupaten lain juga dengan provinsi lain, yaitu Jawa Timur. Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah di sebelah barat, dengan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah di sebelah utara, dengan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur di sebelah timur, dan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur di sebelah selatan.

Secara administratif, Kabupaten Blora terbagi menjadi 16 kecamatan dan 295 desa/kelurahan. Keseluruhan wilayah administratif tersebut menempati wilayah Kabupaten seluas 1.820,59 km<sup>2</sup>.

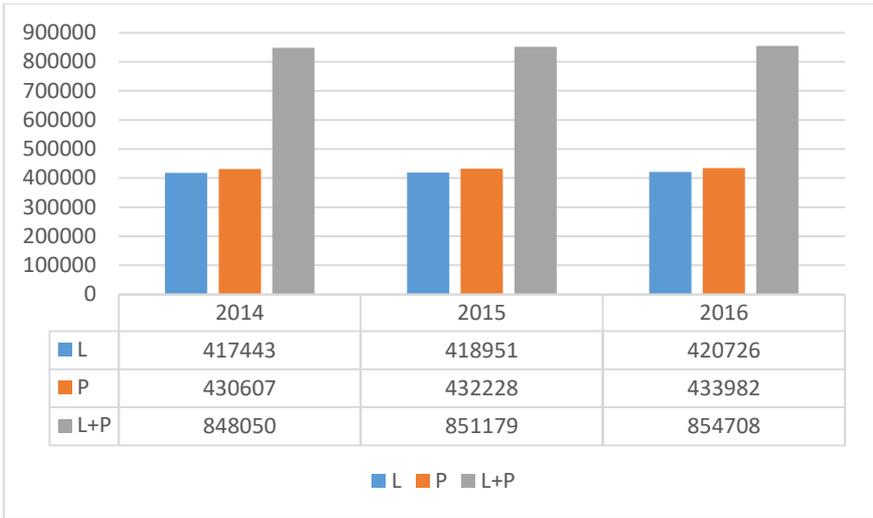
---

## 1.2 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan modal dasar dalam suatu pembangunan. Akan tetapi jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat memicu permasalahan mengenai penyediaan sandang, pangan, dan papan. Permasalahan tersebut dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat yang tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya. Penyediaan pangan yang tidak tercukupi akan menimbulkan terjadinya kelaparan. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi akan menimbulkan pemukiman kumuh, liar, dan tidak layak. Selain tingkat pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah.

Kebijakan pembangunan dan kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem informasi kependudukan yang andal, sehingga upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Blora Tahun 2016 yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan tabulasi hasil Susenas 2016 adalah sebesar 854.708 jiwa.

*Gambar 1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kabupaten Blora, 2014 - 2016*



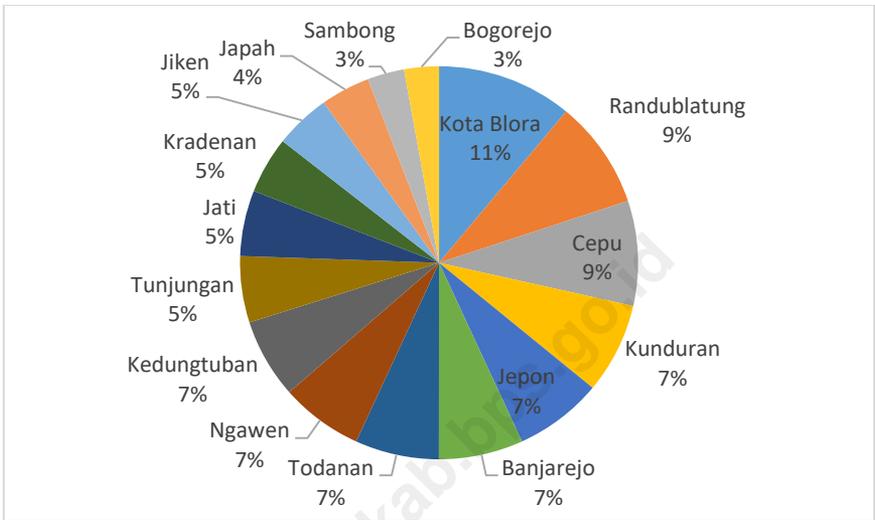
### 1.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Persebaran penduduk antar daerah yang kurang merata menimbulkan masalah pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Selain itu, persebaran penduduk yang tidak merata juga mengakibatkan perbedaan tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan luas wilayahnya yang dihitung dalam satuan jiwa per km persegi. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak sedangkan lahan dan luas wilayah tidaklah bertambah.

Tidak meratanya persebaran penduduk akan menyebabkan berbagai ketimpangan fasilitas dan sumber daya antar daerah tersebut. Daerah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan seperti meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak diimbangi dengan memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, tidak tercukupinya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta

masalah-masalah sosial lainnya. Bagi daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit akan mengakibatkan kekurangan tenaga kerja untuk mengolah lahan pertanian yang luas sehingga menyebabkan sumber-sumber daya alam/kekayaan yang ada tidak atau belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Gambar 2. Persentase jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Blora, 2016



Di Kabupaten Blora, tiga kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Kota Blora, Kecamatan Randublatung, serta Kecamatan Cepu.

Khusus untuk data persebaran penduduk menurut kecamatan ini tidak bersumber dari estimasi hasil Susenas. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sampel yang tidak dapat digunakan untuk memperkirakan statistik hingga tingkat kecamatan. Oleh karena itu, data persebaran yang dicantumkan pada publikasi ini didasarkan pada angka proyeksi penduduk yang diambil dari publikasi Kabupaten Blora dalam Angka Tahun 2016.

Berdasar estimasi jumlah penduduk tahun 2016, kepadatan penduduk Kabupaten Blora dapat dihitung sebesar 469 jiwa per km<sup>2</sup>.

Dengan luas wilayah mencapai 1.820,588 km<sup>2</sup>, tentu kepadatan penduduk di setiap kecamatan bervariasi.

### 1.4 Rasio Jenis Kelamin

Menurut hasil Susenas 2016, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Blora diperkirakan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yakni 433.982 juta jiwa berbanding 420.726 jiwa, dengan nilai rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 96,94. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pada tahun 2016 di Kabupaten Blora terdapat 97 orang laki-laki pada setiap 100 orang perempuan. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan.

Catatan di atas menegaskan bahwa komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk Blora masih didominasi oleh penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin yang berkisar pada angka 97 pada kurun waktu tiga tahun terakhir.

*Tabel 1. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Blora, 2014 – 2016*

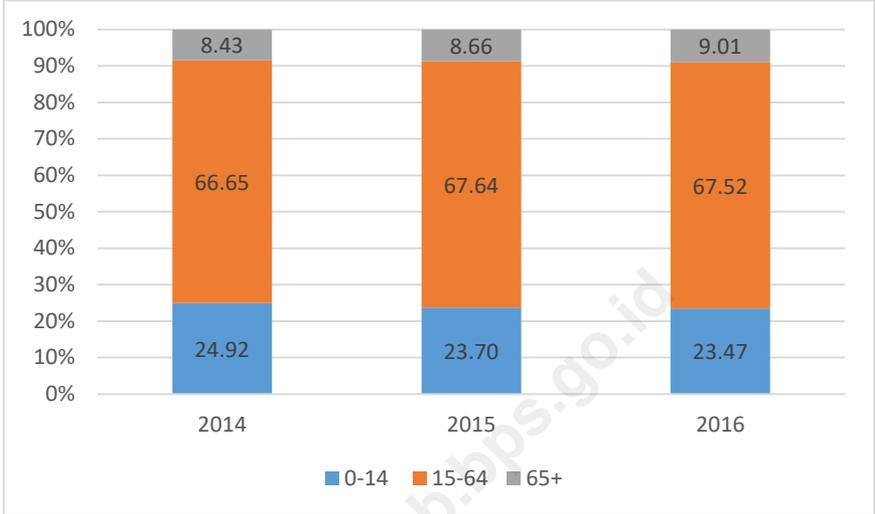
Tahun	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Rasio Jenis Kelamin	96,94	96,93	96,95

### 1.5 Struktur Umur

Struktur umur penduduk Kabupaten Blora mengalami transisi menuju ke penduduk tua. Struktur tersebut ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) dan semakin bertambahnya penduduk pada kelompok usia dewasa (15-64 tahun) serta kelompok usia tua (65 tahun ke atas).

Berdasarkan pengolahan data Susenas 2016, pada Tabel 1.3 terlihat distribusi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa 23,47 persen penduduk Kabupaten Blora yang berusia muda, 67,52 persen berusia produktif, dan hanya 9,01 persen yang berusia tua.

Gambar 3. Persentase Penduduk Kabupaten Blora Menurut Kelompok Umur 2014-2016



## 1.6 Rasio Ketergantungan

Perubahan struktur penduduk menurut umur memengaruhi besarnya angka rasio ketergantungan. Angka rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun). Tinggi rendahnya rasio ketergantungan memengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, berarti semakin besar hambatan atas upaya perkembangan daerah. Angka rasio ketergantungan Kabupaten Blora tahun 2016 sebesar 48,11 yang artinya setiap 100

---

penduduk usia produktif menanggung sekitar 48 orang penduduk usia tidak produktif.

Angka rasio ketergantungan penduduk muda (34,76) lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan penduduk tua (13,34). Hal ini menunjukkan masih perlunya program-program pembangunan yang diprioritaskan pada penduduk usia muda (0-14 tahun) terutama di bidang pendidikan.

## **1.7 Kepemilikan Akta Kelahiran**

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Akta Kelahiran nantinya akan sangat berguna di masa depan dalam mengurus berbagai hal seperti pendidikan, pekerjaan, pernikahan, dan lainlain.

Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa penduduk yang berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkan sebesar 89,49 persen dan 8,20 persen yang memiliki akta kelahiran tetapi tidak dapat menunjukkan. Masih terdapat 2,30 persen penduduk umur 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran.

Jika dibandingkan dengan statistik di tingkat provinsi, angka di Kabupaten Blora cukup menggembarakan. Pasalnya, secara umum di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki akta kelahiran sebanyak 92,6 persen sedangkan di Kabupaten Blora sebanyak 97,69 persen. Selain kesadaran masyarakat, capaian ini juga didukung oleh kesigapan pemerintah dalam hal melayani rakyatnya terkait dengan administrasi dasar kependudukan.

Memiliki akta kelahiran adalah hak setiap anak di Indonesia. Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian

---

tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Tetapi masih sering dijumpai orang tua berbondong-bondong mencari akta kelahiran ketika anak membutuhkan akta seperti pada masa pendaftaran sekolah.

Oleh karena itu, perlu dilihat juga alasan penduduk yang belum memiliki akta kelahiran untuk anak-anak mereka. Di Kabupaten Blora, sebagian besar penduduk belum memiliki akta kelahiran karena memang aktanya belum terbit. Artinya, dengan alasan ini orang tua sudah memproses penerbitan akta kelahiran tetapi belum rampung. Alasan ini tercatat sebanyak 47,87 persen.

Alasan lainnya yang disebutkan adalah karena tidak punya biaya (13,98 persen) dan tempat pengurusan jauh (8,46 persen). Dalam Susenas 2016, tidak didapati penduduk yang mengemukakan alasan tidak tahu caranya, tidak merasa perlu, serta tidak mau repot atau malas. Sepintas, ini mengindikasikan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak-anak mereka.

## **1.8 Fertilitas dan Umur Perkawinan Pertama**

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk yang meningkat. Angka fertilitas yang tidak terkendali akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga beban negara akan semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blora 2016

---

suatu daerah. Tingginya angka kelahiran tersebut sangat erat kaitannya dengan usia perkawinan pertama. Usia perkawinan pertama sebagai umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Pada tahun 2016 wanita yang melakukan perkawinan pertama pada umur 19-24 tahun sebesar 35,57 persen. Wanita yang melakukan perkawinan pertama pada umur 17-18 tahun sebesar 29,64 persen dan yang menikah pertama kali pada umur 25 tahun ke atas sebanyak 8,21 persen. Sementara itu, masih ada wanita yang cenderung kawin pada umur kurang dari 17 tahun mencapai 26,58 persen.

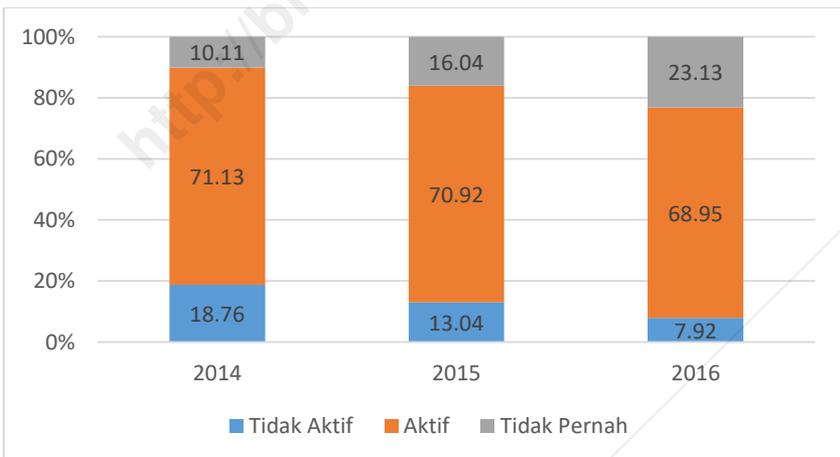
Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, wanita cenderung kawin pada umur 19-24 tahun yaitu sebanyak 49,97 persen wanita di perkotaan dan 42,56 persen di perdesaan. Persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama pada umur kurang dari 17 tahun di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan yaitu 21,05 persen berbanding 12,85 persen. Demikian pula yang terjadi pada kelompok umur 17-18 tahun yaitu di daerah perdesaan sebesar 26,99 persen dan di perkotaan sebesar

19,30 persen. Sebaliknya pada kelompok umur 19 tahun ke atas, di perkotaan memiliki persentase yang cenderung lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.

### 1.9 Keluarga Berencana

Selain melalui penundaan umur perkawinan pertama, Keluarga Berencana (KB) masih dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. KB berupaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yaitu membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jarak kehamilan dan usia ideal melahirkan anak, serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program KB dapat menjadi salah satu kunci sukses untuk menekan laju penduduk yang saat ini sangat sulit untuk dikendalikan. Disamping itu dalam rangka mencapai Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum sehingga dapat mengurangi jumlah angka kelahiran. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif membantu pemerintah dengan ber-KB melalui penggunaan alat kontrasepsi.

Gambar 4. Persentase Wanita Usia Subur (15-49 Tahun) yang Berstatus Pernah Kawin menurut Partisipasi ber-KB di Kabupaten Blora, 2014-2016



---

Jika dilihat di gambar di atas, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB pada tahun 2016 sudah mencapai 68,95 persen. Sedangkan wanita umur 15-49 tahun yang pernah menggunakan alat kontrasepsi dan sekarang sudah tidak menggunakan lagi sebanyak 7,92 persen dan sisanya sebanyak 23,13 persen yang tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.

Kemudian menurut alat kontrasepsi yang digunakan oleh wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin, didapati bahwa sebagian besar dari mereka menggunakan metode suntikan untuk mengatur kelahiran. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 71,17 persen yang menggunakan suntik KB. Catatan ini melanjutkan tren tahun-tahun sebelumnya di mana metode suntikan mendominasi di atas 70 persen dibandingkan metode-metode lainnya.

Di bawah metode suntik, metode yang juga digunakan oleh masyarakat Kabupaten Blora adalah pil (13,47 persen), susuk KB atau implan (5,97 persen), steril (4,77 persen), IUD atau spiral (2,45 persen), kondom (0,3 persen). Selebihnya menggunakan metode lainnya atau tradisional sebanyak 1,87 persen.

---

## **BAB IV**

### **KESEHATAN**

Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Oleh sebab itu, tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka proses dan dinamika pembangunan ekonomi di wilayah tersebut akan semakin baik. Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses pelayanan publik di bidang kesehatan, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau.

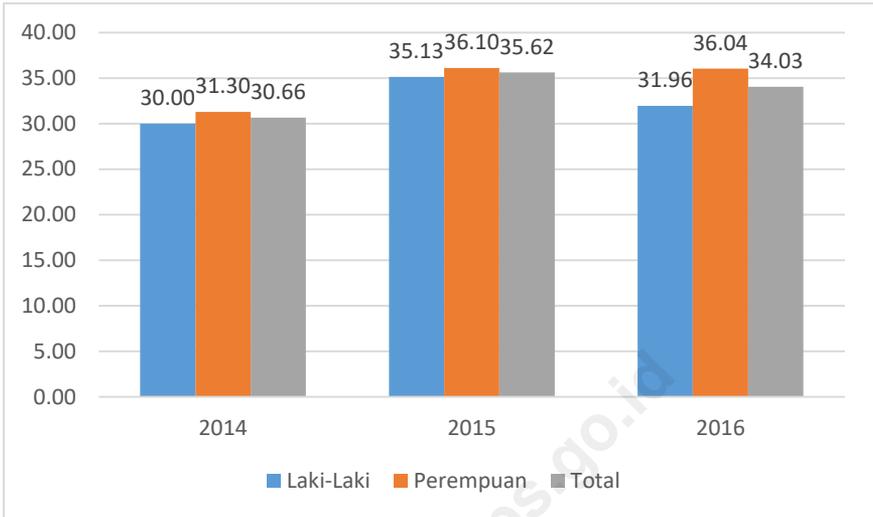
Peningkatan kualitas hidup penduduk merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Peningkatan kualitas penduduk secara fisik dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Indikator utama yang dipakai untuk melihat derajat kesehatan penduduk salah satunya adalah angka kesakitan. Program pembangunan di bidang kesehatan juga bertujuan untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk. Meningkatnya derajat kesehatan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk sehingga dapat mencapai kesejahteraan.

#### **2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat**

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, status kesehatan memberikan pengaruh pada tingkat produktivitas. Untuk mengukur tingkat kesehatan penduduk dapat terlihat dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menderita sakit. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan

dan menderita sakit berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut.

Gambar 5. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Kabupaten Blora, 2014-2016



Jika melihat gambar di atas, keluhan kesehatan penduduk Kabupaten Blora tahun 2016 menunjukkan 34,03 persen. Persentase ini menurun jika dibandingkan dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di tahun 2015 sebesar 35,62 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan lebih rendah dibanding penduduk perempuan, yaitu masing-masing sebesar 31,96 persen dan 36,04 persen.

Lama terganggu merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat. Menurunnya persentase penduduk yang menderita sakit tidak dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan yang lebih baik, jika tidak diikuti dengan menurunnya rata-rata lama terganggu. Semakin lama (hari) terganggu, maka keluhan kesehatan yang

---

dialami masyarakat diasumsikan cukup serius dan dapat memengaruhi tingkat produktivitas.

Hasil Susenas tahun 2015 dan 2016 rata-rata lama terganggu berada pada kisaran paling lama 3 hari. Rata-rata hari lamanya mengalami gangguan kesehatan 3 hari atau kurang di Kabupaten Blora adalah 55 persen pada tahun 2016 dan 56,86 persen pada tahun 2015.

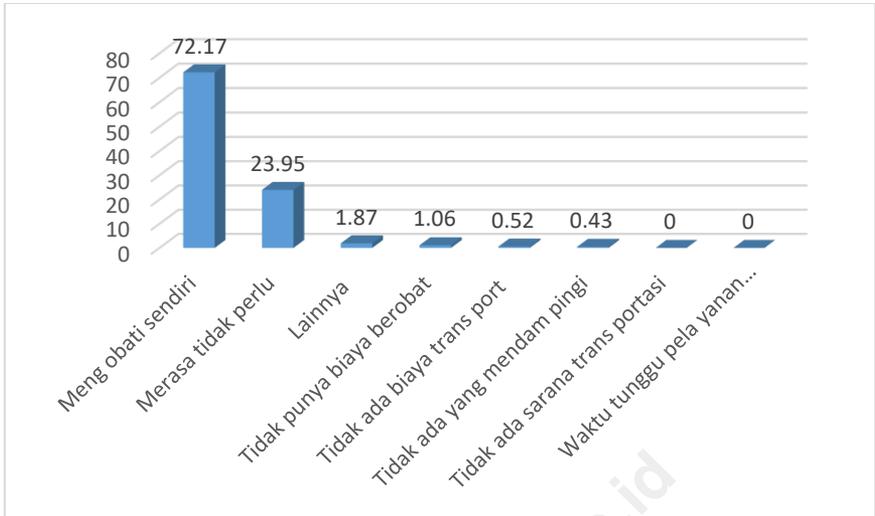
## **2.2. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan**

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan. Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

Penduduk yang berobat jalan sebanyak 55,39 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan yang berobat jalan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yang berobat jalan, yaitu masing-masing sebesar 56,50 perempuan dan 54,09 persen laki-laki.

Jika dilihat dari persentase penduduk yang berobat jalan, masih ada 44,61 persen penduduk yang tidak berobat jalan. Cara pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat selain berobat jalan adalah mengobati sendiri atau merasa tidak perlu diobati. Untuk itu perlu diketahui alasan apa saja yang menjadi penyebab masyarakat tidak melakukan berobat jalan. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Gambar 6. Persentase Penduduk Menurut Alasan Tidak Berobat di Kabupaten Blora, 2016



Berdasarkan gambar di atas penduduk yang tidak berobat jalan sebagian besar memilih untuk mengobati sendiri sebanyak 72,17 persen. Selain itu, penduduk yang merasa tidak perlu berobat jalan sebesar 23,95 persen. Walaupun persentasenya rendah, masih ada penduduk yang tidak berobat jalan dengan alasan tidak punya biaya berobat, tidak ada yang mendampingi, dan tidak ada biaya transport.

Sebagian besar penduduk yang berobat jalan memilih praktik dokter/bidan untuk memperoleh jalan kesembuhan. Tercatat sebesar 60,29 persen yang pergi ke praktik dokter/bidan untuk berobat. Selanjutnya, puskesmas atau pustu menjadi alternatif pilihan terbanyak bagi penduduk Kabupaten Blora untuk berobat jalan ketika sakit. Persentase yang berobat jalan ke puskesmas atau pustu sebanyak 19,33 persen.

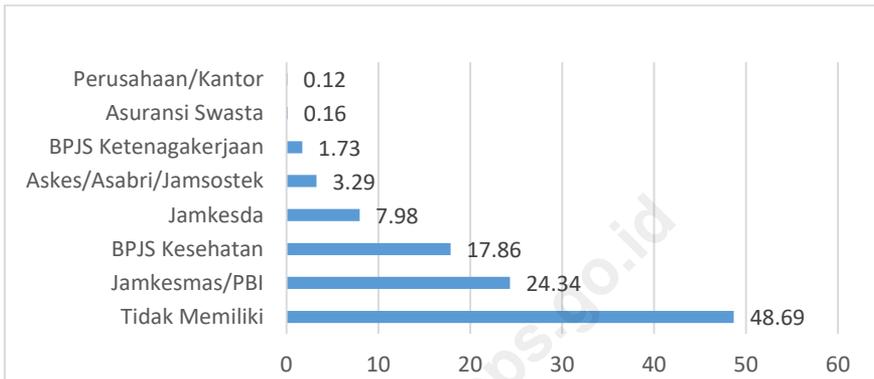
### 2.3. Penggunaan Jaminan Kesehatan

Pembangunan kesehatan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blora 2016

yang optimal. Pemerintah berupaya menyediakan jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dengan adanya jaminan kesehatan tersebut, diharapkan kebutuhan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

*Gambar 7. Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Blora, 2016*



Jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki masyarakat adalah Jamkesmas/PBI (24,34 persen), BPJS Kesehatan (17,86 persen), Jamkesda (7,98 persen), Askes/Asabri/Jamsostek (3,29 persen), dan BPJS Ketenagakerjaan (1,73 persen). Namun demikian, masih ada 48,69 persen masyarakat yang mengaku tidak memiliki jaminan kesehatan sama sekali.

## 2.4. Kebiasaan Merokok

Merokok bukanlah hal yang aneh lagi di masa kini. Dalam keseharian, baik di lingkungan tempat kerja, lingkungan keluarga hingga jalanan umum, sering dijumpai masyarakat yang sedang merokok. Merokok kini seolah menjadi budaya akibat terbiasakan dalam kehidupan masyarakat. Makin banyak perokok dari berbagai kalangan usia, termasuk usia anak sekolah. Terlepas dari itu, rokok

sangat berbahaya bagi kesehatan para perokok aktif maupun pasif yang hanya terpapar asap dari rokok tersebut.

Gambar 8. Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas di Kabupaten Blora Menurut Kebiasaan Merokok, 2016

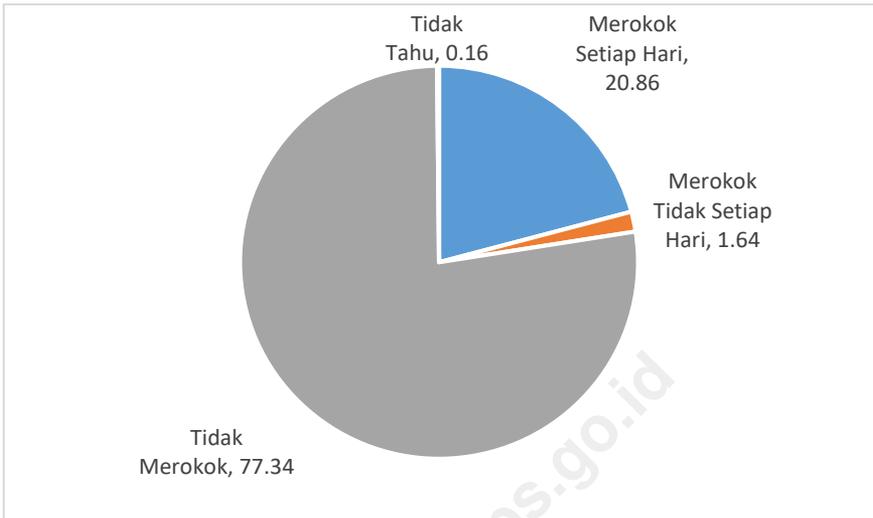


Diagram di atas menunjukkan persentase penduduk yang memiliki kebiasaan merokok. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang memiliki kebiasaan merokok, baik setiap hari maupun tidak setiap hari, masing-masing sebesar 20,86 persen dan 1,64 persen. Sementara itu, penduduk yang tidak merokok sebesar 77,34 persen. Hal ini patut disyukuri karena banyaknya penduduk yang memiliki kesadaran untuk tidak merokok.

## 2.5. Penolong Proses Kelahiran

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat tetapi juga dilihat dari indikator penolong persalinan. Dengan meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga medis dapat memengaruhi

---

keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan.

Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut penolong kelahiran anak terakhir di Jawa Tengah sebagian besar adalah oleh bidan (70,47 persen) dan dokter (29,53 persen). Mudahnya akses yang didapat masyarakat serta biaya yang terjangkau, maka sebagian besar masyarakat cenderung lebih untuk mengunjungi bidan, baik bidan praktik maupun bidan desa.

Perhatian pemerintah terhadap kesehatan semakin ditingkatkan terutama pada ibu hamil dan balita. Salah satu tujuan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah meningkatkan kemandirian keluarga dalam memelihara kesehatan ibu dan anak. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu

Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut tempat melahirkan anak terakhir di Jawa Tengah sebagian besar di Klinik/Bidan/Praktik Dokter (60,32 persen) dan di RS/RS Bersalin (29,83 persen).

---

## **BAB V**

### **PENDIDIKAN**

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsanya melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sangat penting bagi suatu bangsa karena menjadi salah satu investasi bagi pembangunan dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas sehingga dapat mendukung kemajuan bangsa. Peranan pendidikan yang sangat penting tersebut menjadikan sektor pendidikan sebagai sasaran utama dalam setiap program pembangunan.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan program pembangunan sarana prasarana sekolah, ditunjang dengan program bantuan biaya sekolah dan berbagai macam beasiswa. Pemenuhan atas hak pendidikan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam pembangunan, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang masih mendapatkan perhatian paling besar. Hal ini disebabkan karena masih ditemukannya masalah mendasar dalam bidang pendidikan. Angka putus sekolah yang masih cukup tinggi, kesenjangan mendapatkan kesempatan pendidikan antar kelompok penduduk dan antara daerah, serta kualitas pendidikan yang belum bisa memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang semakin kompetitif, merupakan beberapa permasalahan mendasar pendidikan.

---

Kualitas sumber daya manusia dapat juga diukur dengan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk umur 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata lama sekolah dapat mengindikasikan sampai sejauh mana tingkat pendidikan yang dijalani oleh seseorang. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Blora berdasarkan Tabel 3.1 sekitar 6,18 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk dewasa (25 tahun ke atas) baru dapat menyelesaikan sampai kelas 6 SD.

## **5.1 Tingkat Pendidikan**

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang mencerminkan semakin luas pengetahuan dan keahlian/keterampilan yang dimilikinya. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Pada tahun 2016, penduduk umur 10 tahun ke atas yang tidak/belum menamatkan pendidikan di bangku Sekolah Dasar masih relatif tinggi yaitu 24,08 persen. Penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai Sekolah Dasar sebesar 36,30 persen. Masih sedikit penduduk yang mampu menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan perguruan tinggi, yaitu hanya 3,97 persen.

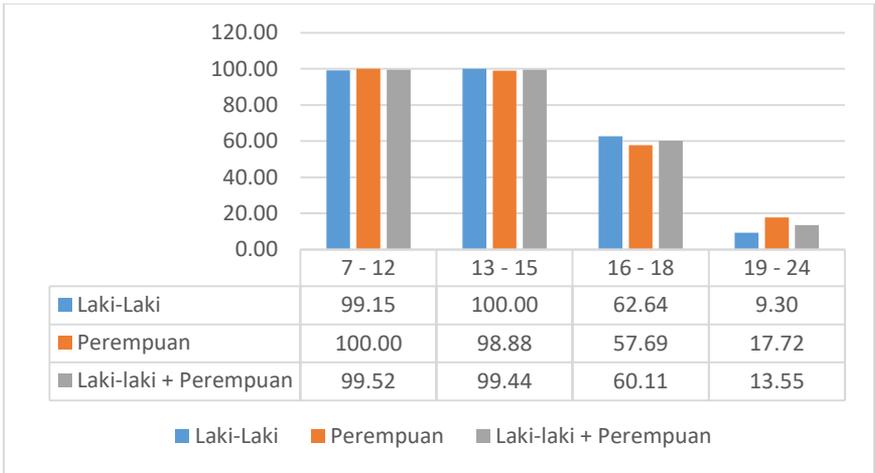
Tabel 2. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Blora Tahun 2016

Pendidikan	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum sekolah	3,56	9,61	6,65
Tidak/belum tamat SD	24,45	23,71	24,08
SD/MI	36,88	35,75	36,30
SMP/MTs	14,31	15,31	14,82
SM/MA	16,69	11,78	14,18
Diploma/Universitas	4,11	3,84	3,97
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## 5.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Salah satu indikator penting yang dapat mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada kelompok umur tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikannya.

Gambar 9. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Blora, 2016



Di Kabupaten Bora, pada kelompok umur sekolah dasar (7-12 tahun) terdapat 99,52 persen penduduk telah bersekolah pada tahun 2016. Ini berarti bahwa ada sebanyak 0,48 persen anak berumur 7-12 tahun yang sedang tidak sekolah di Sekolah Dasar. Dua kemungkinan yang terjadi, yaitu sedang bersekolah di jenjang yang lebih tinggi atau sudah tidak bersekolah lagi. Penduduk umur 13-15 tahun yang sedang bersekolah sebanyak 99,44 persen dan penduduk yang berumur 16-18 tahun yang sedang bersekolah sebanyak 60,11 persen.

Pola yang digambarkan oleh partisipasi sekolah untuk penduduk laki-laki dan perempuan tidak berbeda. Partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan relatif sama di setiap kelompok umur sekolah. Semakin tinggi kelompok umur sekolah maka partisipasinya semakin kecil. Dari gambaran partisipasi tersebut terlihat bahwa kesempatan antara penduduk perempuan dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan di Kabupaten Blora adalah relatif sama.

### 5.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain APS, indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok umur yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Semakin tinggi APM berarti banyak anak pada kelompok umur tertentu yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

*Tabel 3. Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Blora, 2016*

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar	98.00	98.46	98.20
Sekolah Menengah Pertama	77.31	78.85	78.08
Sekolah Menengah	50.05	53.90	52.02
Perguruan Tinggi	4.57	7.94	6.28

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sebesar 98,20 persen penduduk berumur 7-12 tahun sedang bersekolah di Sekolah Dasar. Sementara itu, penduduk umur 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs sebesar 78,08 persen, penduduk umur 16-18 tahun yang sekolah di SM/MA sebesar 52,02 persen dan penduduk umur 19-24 tahun yang sekolah di Akademi/Universitas sebesar 6,28 persen.

Selama kurun waktu 2015-2016 APM di Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan pada semua jenjang pendidikan, kecuali jenjang SM/MA. Angka partisipasi sekolah untuk SD/MI meningkat yaitu dari 94,65 persen menjadi 98,20 persen sedangkan angka partisipasi sekolah untuk SMP/MTs dari 70,51 persen menjadi 78,08 persen. Sementara itu pada tingkat SM/MA, angka partisipasi sekolah berubah dari 63,31 persen menjadi 52,02 persen. Angka Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blora 2016

partisipasi sekolah pada tingkat Perguruan Tinggi meningkat dari 6,21 persen menjadi 6,28 persen.

#### 5.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar merupakan rasio jumlah siswa, berapapun umurnya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan adanya siswa dengan umur lebih tua dibanding umur standar di jenjang pendidikan tertentu. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di umur yang lebih muda.

*Tabel 4. Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Blora, 2016*

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar	115.58	110.95	111.96
Sekolah Menengah Pertama	87.07	81.68	84.36
Sekolah Menengah	84.57	101.33	93.12
Perguruan Tinggi	6.34	11.02	8.7

Data pada tabel di atas menunjukkan APK SD/MI tahun 2016 sebesar 111,96 persen. Sedangkan untuk APK tingkat SMP/MTs dan SM/MA masing-masing sebesar 84,36 persen dan 93,12 persen. APK untuk Perguruan Tinggi masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 8,7 persen.

Jika dibandingkan tahun 2015, APK untuk SD/MI dan Perguruan Tinggi meningkat. Namun, APK untuk SMP dan SM/MA

---

mengalami penurunan. APK untuk SD/MI naik dari 103,68 persen menjadi 111,96 persen. APK untuk SMP/MTs menurun dari 87,78 persen menjadi 84,36 persen. APK pada tingkat SM/MA juga menurun dari 99,87 persen menjadi 93,12 persen. Pada tingkat Perguruan Tinggi, APK justru mengalami peningkatan dari 7,13 persen menjadi 8,7 persen.

<http://blorakab.bps.go.id>

---

## **BAB VI PERUMAHAN**

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah tempat tinggal yang layak. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kebutuhan dasar akan rumah tempat tinggal dengan lingkungan sekitar yang baik dan sehat merupakan kebutuhan yang penting untuk dipenuhi. Rumah dan kelengkapannya selain merupakan kebutuhan dasar, juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat.

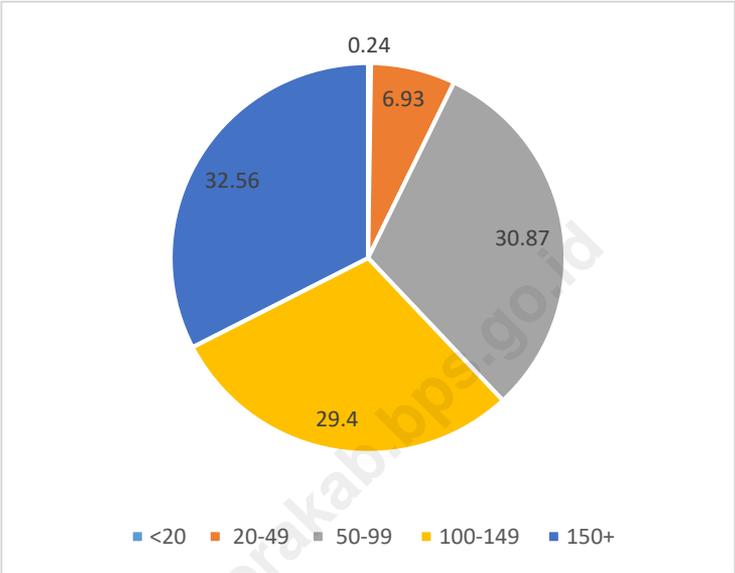
Keadaan higienis dan sanitasi lingkungan penduduk bisa dilihat dari kondisi perumahannya. Perumahan yang tidak sehat dan terlalu sempit mengakibatkan mudah terjangkitnya penyakit dalam masyarakat. Rumah sehat adalah kondisi fisik, kimia, biologi di dalam rumah dan perumahan sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Selain itu, kualitas lingkungan rumah tinggal juga memengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya.

Secara umum kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

### **6.1 Kualitas Rumah Tempat Tinggal**

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dicerminkan salah satunya dengan luas bangunan rumah yang dihuni. Semakin tinggi status sosial suatu rumah tangga maka semakin luas lantai yang dikuasai oleh rumah tangga. Oleh karena itu, luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Gambar 10. Persentase Rata-rata Luas Lantai Kabupaten Blora, 2015-2016



Gambar di atas menggambarkan luas lantai rumah (dalam meter persegi) yang ditempati rumah tangga. Rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 50 meter persegi sebesar 7,17 persen, dan yang menempati rumah dengan luas lantai 50-99 meter persegi sebesar 30,87 persen, sedangkan yang menempati rumah dengan luas lantai 100 meter persegi atau lebih cukup dominan dengan persentase hingga 61,96 persen.

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah

---

yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Semakin banyak rumah tinggal yang memiliki beberapa kualitas mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas perumahan di suatu daerah. Persentase rumah tangga dengan rumah tinggal yang lantai terluas tanah masih lebih banyak, yaitu 51,65 persen.

Namun demikian, dilihat dari kondisi dinding dan atap terluas, status perumahan di Kabupaten Blora sudah cukup menggembirakan. Untuk dinding terluas, 95,5 persen rumah tinggal sudah menggunakan dinding permanen berupa tembok atau kayu. Dilihat dari jenis atap terluas, 99,84 persen rumah tinggal di Kabupaten Blora juga sudah menggunakan jenis atap permanen, seperti beton, genteng, asbes, atau seng.

## **6.2 Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal**

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Semakin banyak persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut.

*Tabel 5. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Blora, 2014-2016*

Tahun	Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal		
	Milik sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	94.50	0.98	4.52
2015	95.14	0.95	3.91
2016	95.94	1.20	2.86

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, persentase rumah tangga di Kabupaten Blora pada tahun 2016 yang menempati rumah sendiri sebesar 95,94 persen, dan yang menempati rumah kontrak/sewa sebesar 1,2 persen, sedangkan yang menempati rumah dinas/bebas sewa/lainnya sebesar 2,86 persen.

Dibanding tahun sebelumnya, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri meningkat, yaitu dari 95,14 persen menjadi 95,94 persen. Sementara itu, persentase rumah tangga yang menempati rumah kontrak atau sewa meningkat yaitu dari 0,95 persen menjadi 1,20 persen. Sebaliknya, rumah tangga yang tinggal di rumah dinas atau bebas sewa mengalami penurunan yaitu dari 3,91 persen menjadi 2,86 persen.

### **6.3 Fasilitas Perumahan**

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Fasilitas yang digunakan oleh rumah tangga tersebut juga menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Penggunaan fasilitas perumahan seperti penerangan listrik dan air bersih sudah relatif banyak dimanfaatkan masyarakat. Berdasarkan data Susenas 2016, ada 99,77 persen rumah tangga di Kabupaten Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blora 2016

---

Blora yang memiliki fasilitas penerangan listrik, 34,57 persen rumah tangga yang telah memiliki fasilitas air minum kemasan/leding, dan 80,11 persen memiliki jamban sendiri dengan tangki septik.

Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Penggunaan fasilitas penerangan listrik untuk tahun 2015 relatif tidak berbeda dengan tahun 2016, yaitu sebesar 99,89 persen.

Program penyediaan air bersih terus menerus diupayakan pemerintah. Penggunaan air minum kemasan/leding di Kabupaten Blora mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data tahun 2015, yaitu dari 33,29 persen menjadi 34,57 persen pada tahun 2016.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Di samping telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Penggunaan jamban sendiri dengan tangki septik di Kabupaten Blora mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penggunaan fasilitas jamban sendiri dengan tangki septik tahun 2015 sebanyak 73,41 persen menjadi 80,11 persen di tahun 2016.

#### **6.4 Bahan Bakar Memasak**

Memasak merupakan salah satu kegiatan yang tak lepas dari kehidupan manusia dalam mempertahankan hidupnya. Keberagaman bahan bakar yang digunakan untuk memasak menjadikan masyarakat dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.

Hasil Susenas tahun 2016 menunjukkan jenis bahan bakar yang digunakan rumah tangga untuk memasak sebagian besar sudah berupa adalah elpiji. Rumah tangga yang bahan bakar utamanya

---

elpiji tercatat sebesar 59,06 persen. Hal ini disebabkan adanya bantuan dari pemerintah berupa tabung elpiji 3 kg. Selain itu, penjualan elpiji 3 kg mudah dijumpai baik di daerah perdesaan maupun di perkotaan. Bahan bakar untuk memasak lainnya yang masih banyak digunakan penduduk Kabupaten Blora adalah kayu bakar atau arang (38,89 persen).

## **6.5 Penguasaan Alat Komunikasi**

Sesuai dengan perkembangan teknologi, kepemilikan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi telepon selular membuat telepon rumah semakin ditinggalkan.

Data Susenas menunjukkan bahwa 9,16 persen rumah tangga di Kabupaten Blora memiliki komputer atau laptop. Sedangkan kepemilikan telepon rumah di Kabupaten Blora mencapai 1,22 persen dari seluruh rumah tangga.

<http://blorakab.bps.go.id>

---

## **BAB VII PENGELUARAN**

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Besarnya pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi makanan dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga. Semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, biasanya akan semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, pengeluaran non makanan pada rumah tangga berpenghasilan tinggi akan lebih besar.

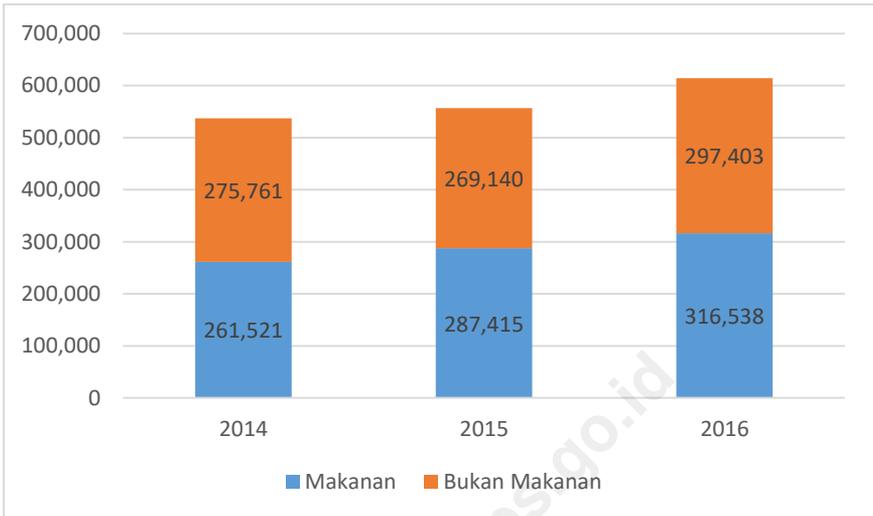
Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap pergeseran pola pengeluarannya. Hal ini terjadi karena pada umumnya elastisitas permintaan terhadap makanan cukup rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap non makanan cukup tinggi. Pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, pendapatan yang meningkat akan digunakan untuk konsumsi barang non makanan atau ditabung. Dengan demikian pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

### **7.1. Pengeluaran Rumah Tangga**

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan merupakan hasil bagi antara total pengeluaran konsumsi seluruh penduduk selama sebulan dengan jumlah penduduk. Selama periode 2015-2016 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Blora meningkat dari Rp. 556.555 menjadi Rp. 613.941. Bila dilihat berdasarkan jenis pengeluarannya, persentase pengeluaran untuk barang bukan makanan mengalami kenaikan dari Rp. 269.140 menjadi Rp.

297.403. Demikian pula pengeluaran untuk makanan meningkat dari Rp. 287.415 menjadi Rp. 316.538.

*Gambar 11. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Blora, 2016 (rupiah)*



Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan pada dasarnya saling berkaitan. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan, sedang sisa pendapatan dapat disimpan sebagai tabungan/diinvestasikan.

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, yang mana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Ernest Engel (1857) mengemukakan

bahwa bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Persentase konsumsi rata-rata per kapita untuk berbagai jenis komoditas pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 6. Jumlah Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan dan Persentasenya Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Blora, 2016*

Jenis Komoditas	Jumlah Pengeluaran (rupiah)	Persentase Terhadap Total Pengeluaran (%)
(1)	(2)	(3)
<b>Kelompok Makanan</b>		
1. Padi-padian	48.061	7,83
2. Umbi-Umbian	626	0,10
3. Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang	9.246	1,51
4. Daging	9.116	1,48
5. Telur dan Susu	17.217	2,80
6. Sayur-sayuran	30.822	5,02
7. Kacang-kacangan	12.187	1,99
8. Buah-Buahan	10.946	1,78
9. Minyak dan Lemak	11.435	1,86
10. Bahan Minuman	11.126	1,81
11. Bumbu-Bumbuan	6.356	1,04
12. Konsumsi Lainnya	7.707	1,26
13. Makanan dan Minuman Jadi	98.322	16,01
14. Tembakau dan Sirih	43.373	7,06
<b>Jumlah Makanan</b>	<b>316.538</b>	<b>51,56</b>
<b>Kelompok Bukan Makanan</b>		
15. Pengeluaran rumah tangga perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	141.409	23,03
16. Pengeluaran rumah tangga Aneka Barang dan Jasa	71.120	11,58
17. Pengeluaran rumah tangga Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala	15.123	2,46
18. Pengeluaran rumah tangga Barang Tahan Lama	48.711	7,93
19. Pengeluaran rumah tangga Pajak, Pungutan dan Asuransi	9.625	1,57

Jenis Komoditas	Jumlah Pengeluaran (rupiah)	Persentase Terhadap Total Pengeluaran (%)
(1)	(2)	(3)
20. Pengeluaran rumah tangga Keperluan pesta dan Upacara/Kenduri	11.415	1,86
<b>Jumlah Bukan makanan</b>	<b>297.403</b>	<b>48,44</b>
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>613.941</b>	<b>100,00</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengeluaran makanan mengambil porsi setengah lebih dari total pengeluaran per kapita per bulan. Mengacu kepada pola pengeluaran ini, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Blora masih harus ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Blora masih di bawah rata-rata. Persentase pengeluaran makanan provinsi Jawa Tengah 49,73 persen sedangkan pengeluaran bukan makanannya mencapai 50,27 persen.

---

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1 Kesimpulan**

Pemerintah pusat melalui Undang-Undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mengacu kepada konsep ini dan dengan melihat potret kemampuan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Blora, dapat disimpulkan bahwa masih perlu perjuangan yang kontinu untuk mencapai masyarakat Blora yang lebih sejahtera.

Terlebih dengan menilik fakta bahwa peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Blora pada tahun 2016 di tingkat Provinsi Jawa Tengah masih di kelompok terbawah. Dengan angka IPM 66,61 Kabupaten Blora berada di urutan ke-27 dari total 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

### **8.2 Saran**

Selanjutnya, data-data pada publikasi ini dapat dimanfaatkan untuk para pengguna data, baik yang berada di lingkungan pemerintah sebagai pengambil kebijakan maupun masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih lanjut fenomena sosial ekonomi di Kabupaten Blora. Harapannya, data-data yang dihasilkan oleh BPS dapat dijadikan pijakan dalam memunculkan program-program inovasi perbaikan kehidupan.

## LAMPIRAN

Tabel A. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bora, 2014 – 2106

Jenis Kelamin	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	417,443	430,607	420,726
Perempuan	418,951	432,228	433,982
<b>Jumlah</b>	<b>848,050</b>	<b>851,179</b>	<b>854,708</b>

Tabel B. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bora, 2014 – 2016

Kelompok Umur	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 14	211,362	201,697	200,642
15 - 64	565,220	575,746	577,063
65+	71,468	73,736	77,003
<b>Jumlah</b>	<b>848,050</b>	<b>851,179</b>	<b>854,708</b>

Tabel C. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas  
Kabupaten Blora, 2014 - 2016

Jenis Atap	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Beton	0.51	0.43	0.07
Genteng	98.92	98.65	98.45
Sirap	0.00	0.12	0.14
Seng/Asbes	0.57	0.80	1.34
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Tabel D. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding  
Terluas Kabupaten Blora, 2014 – 2016

Jenis Dinding	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Tembok/Plesteran	15.74	20.24	19.58
Kayu/Batang Kayu	80.47	76.45	75.92
Bambu/Anyaman	2.17	2.25	3.65
Lainnya	1.62	1.06	0.85
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Tabel E. Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai  
Terluas Kabupaten Blora, 2014 - 2016

Jenis Lantai	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Bukan Tanah	38.89	46.00	48.35
Tanah	59.11	53.52	51.65
Lainnya	2.00	0.48	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Tabel F. Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama Kabupaten Blora, 2014 - 2016

Sumber Air Minum	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Air dalam kemasan	25.66	27.99	30.96
Leding	3.40	5.30	3.61
Pompa	25.74	25.32	32.47
Sumur	39.20	34.99	29.89
Mata air	5.31	4.58	2.98
Air permukaan	0.69	1.82	0.09
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Tabel G. Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Kabupaten Blora, 2014 - 2016

Tempat Buang Air Besar	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Sendiri	76.51	73.41	80.11
Bersama	12.99	15.11	13.13
Umum	1.05	0.40	0.85
Tidak ada	9.45	11.08	5.91
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BLORA**

Jln. Rajawali No. 12 Blora

Telp. 0296 - 531191 Fax. 0296 - 531191

E-mail: [bps3316@bps.go.id](mailto:bps3316@bps.go.id) website <http://blorakab.bps.go.id>